

Implementasi “*Blue Economy*” Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Kelurahan Bajoe Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

A. Triska Damayanti¹, Munawarah², Jumriani³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *blue economy* dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kelurahan Bajoe ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Blue Economy* di Kelurahan Bajoe belum optimal. Dalam aspek pengelolaan sumber daya laut, nelayan menghadapi kendala seperti pencemaran laut, keterbatasan dalam efisiensi pemanfaatan sumber daya, belum diterapkannya prinsip nirlimbah secara maksimal, serta ketergantungan pada pasar lokal tanpa diversifikasi usaha. Adapun implementasi *blue economy* sesuai dengan perspektif ekonomi syariah, belum sepenuhnya tercermin dalam aktivitas ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Bajoe, ditandai dengan minimnya inovasi, kurangnya teknologi ramah lingkungan, dan terbatasnya pelatihan yang mendukung pengembangan usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan penerapan *blue economy* yang berlandaskan pada nilai-nilai ekonomi syariah untuk mewujudkan peningkatan pendapatan nelayan yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Implementasi, Blue Economy, Nelayan, Ekonomi Syariah.*

Pendahuluan

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geografis yang mencerminkan kekayaan potensi sumber daya alam, baik di wilayah daratan maupun perairan lautnya. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengemban tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah laut dan kawasan pesisir yang mencakup area sekitar 60.000 km². Dalam konteks pemanfaatan kawasan pesisir, aktivitas utama yang menonjol meliputi penangkapan ikan serta pengembangan sektor pariwisata bahari dalam (Anida Wati, 2018). Di antara wilayah administratif di provinsi ini, Kabupaten Bone merupakan salah satu daerah yang menunjukkan potensi kelautan dan perikanan yang sangat signifikan.

Kabupaten Bone merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi kekayaan bahari yang melimpah. Keunggulan sumber daya kelautan ini menjadikan sektor bahari sebagai tumpuan utama mata pencaharian sebagian besar penduduk setempat, terutama yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang hasil laut. Salah satu wilayah yang mencerminkan karakteristik tersebut adalah Kelurahan Bajoe, yang terletak di bagian timur Kabupaten Bone, di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan (Preti Sinta dan Arifin Sahaka 2023).

Dari hasil observasi, peneliti menemukan bahwa pada dasarnya mayoritas penduduk di Kelurahan Bajoe yang bekerja sebagai nelayan telah memanfaatkan sumber

daya laut sebagai mata pencaharian mereka sejak dahulu. Hal ini dibuktikan dengan mayoritas penduduk pesisir dari berbagai kalangan hanya berprofesi sebagai nelayan yang setiap hari hanya bergantung pada hasil tangkapan mereka tanpa ada pekerjaan sampingan. Para nelayan memulai aktivitas sejak dini hari hingga petang dengan modal perahu dan alat bantu lainnya ("Hasil Observasi Peneliti di kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia." 2024).

Sejauh ini, penelitian tentang "*blue economy*" sudah diteliti oleh "Hani Mukaromah dan Lilik Rahmawaty" (Hani Mukaromah dan Lilik Rahmawaty 2023) "Aulia Audrey Al Fahri, Dinda Norrahmawati, Kevin Daru Bailovan, Rifky Usman Alfarez, Sekar Alifia Rahmawati, Kismartini, dan Hartuti Purnaweni" (Aulia Audrey Al Fahri, Dinda Norrahmawati, Kevin Daru Bailovan 2022), "Lutvia Resta Setyawati, Hadistian, Dimas Danur Cahya, Marsetio, Ariska Dian Novarianti, Budiman Djoko Said" (Setyawati et al. 2021), "Ajeng Wijayanti dan Ramlah" (Ajeng Wijayanti dan Ramlah. 2022), dan "Gina Sonya Adriadi, Mansur Afifi, dan Baiq Saripta" (Gina Sonya Adriadi 2022). Namun, mereka cenderung hanya meneliti aspek "pembangunan dan peluang dari *blue economy*" saja.

Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pembangunan dan peluang implementasi *blue economy* dari skala nasional secara umum. Penelitian dari tingkat lokal masih sangat kurang yang meneliti, khususnya daerah pesisir di Kelurahan Bajoe yang terletak di Kabupaten Bone. Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka peneliti mencoba mengkaji implementasi "*blue economy*" di Kelurahan Bajoe berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan hasil yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan membahas mengenai implementasi *blue economy* dan dampaknya terhadap pendapatan nelayan, yang kemudian akan dihubungkan dengan perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang implementasi *blue economy* dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kelurahan bajoe yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang suatu fakta, realitas, atau fenomena. peneliti berperan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan (Yusanto, 2019).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif berupaya untuk menangkap berbagai persoalan yang ada di masyarakat dan mengungkap makna yang terkandung dalam konteks penelitian ini adalah dampak implementasi *blue economy*.

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif melibatkan keaktifan dan keterlibatan pribadi dalam proses pengumpulan dan analisis data. Peneliti hadir sebagai instrumen utama untuk mendalami dan memahami fenomena yang diteliti.

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yang mana pada data sekunder diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung dan juga wawancara kepada pihak yang terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh peneliti dari data yang sudah ada seperti catatan, buku-buku, artikel ilmiah serta data pendukung lainnya (Andi Patimbangi dan Rahma Hidayati Darwis 2024).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Peneliti akan melaksanakan wawancara kepada informan yang berprofesi sebagai nelayan serta stakeholder terkait.

Untuk penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari beberapa sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan siklus tersebut dilakukan secara berulang-ulang sampai datanya jenuh. Pada tahap ini, peneliti memeriksa dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari wawancara responden dan juga dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Teknik analisis data dalam penelitian ini yang pertama adalah data reduction yaitu peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih memfokuskan dan pada bagian yang penting serta memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi *blue economy* dalam meningkatkan pendapatan nelayan, yang kedua data display yaitu Penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dengan mengurutkan hal-hal penting yang telah dirangkum secara teratur untuk memperoleh data yang jelas terkait implementasi *blue economy* dalam meningkatkan pendapatan nelayan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, dan yang ketiga conclusion drawing/verification yaitu peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah dikumpulkan mengenai implementasi *blue economy* dalam meningkatkan pendapatan nelayan ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.

Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian terkait Implementasi “*Blue Economy*” dalam meningkatkan pendapatan nelayan di kelurahan bajoe ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, maka peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil Observasi, Wawancara, dan dokumentasi di Wilayah Kabupaten Bone, tepatnya di Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

Implementasi Blue Economy Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di kelurahan Bajoe

Blue economy atau biasa disebut ekonomi biru adalah konsep baru yang dikemukakan sebagai pendekatan inovatif dalam pengelolaan sektor kelautan. Konsep ini mengacu pada serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi berbasis kelautan, dengan menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Substansi dari konsep ekonomi biru yaitu pengelolaan sumber daya laut secara bijak dengan mengutamakan inovasi, kreativitas, efisiensi, dan efektivitas tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut. Salah satu landasan utama pauli adalah menciptakan aktivitas ekonomi yang bebas dari sampah maupun limbah sehingga

mampu menjaga keseimbangan ekosistem secara menyeluruh (Ridho Erianto, Indra Mualim Hasibuan 2024). Berdasarkan Prinsip- Prinsip Utama *Blue Economy* yaitu Efisiensi Sumber Daya Alam (*Natural Resource Efficiency*), Nirlimbah (*Zero Waste*), Inklusi Sosial (*Social Inclusiveness*), serta Inovasi dan Adaptasi, kebijakan kelautan dan perikanan seharusnya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serentak mewujudkan pemerataan pembangunan secara proporsional (Publica Indonesia Utama 2022).

Kelurahan Bajoe merupakan wilayah yang didominasi oleh masyarakat nelayan tradisional yang telah mengandalkan sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama selama bertahun-tahun. Aktivitas melaut yang dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari bapak-bapak hingga remaja, mencerminkan tradisi dan kearifan lokal yang telah terjalin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keberagaman hasil tangkapan, seperti berbagai jenis ikan, sotong, udang, dan teripang, menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Akan tetapi potensi di Kelurahan Bajoe sangat banyak, prinsip-prinsip *blue economy* juga belum sepenuhnya berhasil di implementasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun masyarakat telah lama bergantung pada sumber daya laut, mereka belum sepenuhnya menyadari pentingnya pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut yang juga bisa memberi pengaruh signifikan pada peningkatan pendapatan mereka jika dikelola dengan baik.

Meskipun prinsip-prinsip seperti efisiensi sumber daya alam, nirlimbah, inklusi sosial, serta inovasi dan adaptasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan nelayan, dampaknya terhadap pendapatan sementara dan permanen masih sangat terbatas. Salah satu masalah utama adalah pencemaran laut yang tinggi dan pengelolaan sumber daya hanya dilakukan secara individu. Kondisi tersebut menjelaskan bahwa prinsip efisiensi sumber daya belum diterapkan secara maksimal. Dalam konteks teori Milton Friedman, kurangnya efisiensi sumber daya berkontribusi pada pendapatan sementara yang fluktuatif karena hasil tangkapan bergantung pada kondisi yang tidak stabil.

Prinsip nirlimbah juga belum optimal, dimana sebagian besar hasil tangkapan nelayan langsung dijual langsung tanpa diolah lebih lanjut, sehingga tidak ada nilai tambah dari sisa hasil laut. Ketidakmampuan nelayan untuk memanfaatkan limbah menunjukkan bahwa pendapatan permanen belum dapat diwujudkan. Dalam teori Milton Friedman, pendapatan permanen membutuhkan penghasilan yang stabil dan berkelanjutan contohnya dengan diversifikasi pengolahan limbah hasil laut menjadi produk bernilai jual, namun, kurangnya edukasi dan fasilitas menjadi hambatan utama dalam menerapkan prinsip ini.

Prinsip inklusi sosial memberikan akses yang merata terhadap sumber daya laut, tetapi hasil tangkapan belum memberikan nilai ekonomi yang maksimal karena pola distribusi yang sederhana. Sebagian besar nelayan hanya menjual hasil tangkapannya ke pasar lokal atau pengepul. Hal ini menjelaskan bahwa nelayan ketergantungan pada pihak luar tanpa usaha untuk meningkatkan nilai tambah. Akibatnya, pendapatan sementara tetap fluktuatif dan pendapatan permanen sulit terwujud karena tidak ada

diversifikasi usaha. Pada teori Milton Friedman, stabilitas pendapatan hanya bisa dicapai jika sumber penghasilan diperluas dan tidak hanya bergantung pada satu aktivitas ekonomi.

Prinsip inovasi dan adaptasi yang seharusnya menjadi pendorong utama blue economy juga belum memadai di Kelurahan Bajoe. Para nelayan masih menggunakan alat tradisional seperti jaring, tombak, dan kompresor untuk menyelam. Adapun terkait pelatihan formal terkait teknologi baru belum didapatkan oleh para nelayan. Ketidadaan inovasi ini membuat produktivitas rendah dan sulit untuk meningkatkan pendapatan sementara. Dalam teori Milton Friedman (Afzalur Rahman 1995), inovasi diperlukan untuk menciptakan efisiensi ekonomi, yang dapat memberikan peluang terciptanya pendapatan permanen.

Berdasarkan hasil analisis, implementasi blue economy di Kelurahan Bajoe belum mampu meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan baik dalam konteks sementara maupun permanen. Pendapatan sementara masih fluktuatif karena ketergantungan nelayan pada hasil tangkapan yang dipengaruhi oleh pencemaran, cuaca, dan kondisi distribusi. Sementara itu, pendapatan permanen sulit diwujudkan karena tidak ada diversifikasi usaha dan minimnya inovasi.

Implementasi Blue Economy Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di kelurahan Bajoe Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam pemanfaatan sumber daya alam, manusia harus menjaga kelestarian dan tidak merusak. Upaya pembangunan dan pemanfaatannya harus dengan cara yang baik untuk kepentingan bersama (Muhammad Aziz 2022). Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.* (Departemen Agama RI 2025).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam pemanfaatan sumber daya alam, tidak boleh dihabiskan oleh manusia. Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemangku kepentingan diperlukan demi pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, manusia yang menggantungkan aktivitas mata pencahariannya pada sumber daya alam sudah seharusnya tidak hanya fokus semata-mata untuk menghasilkan manfaat ekonomi berupa pendapatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem. Sebagaimana Islam telah memerintahkan kepada manusia untuk bekerja, sebab berusaha dan bekerja adalah inti dari kegiatan ekonomi. Roda ekonomi mustahil akan berjalan tanpa adanya pekerjaan dan usaha yang dilakukan (M. deswan Seperly

2020). Oleh karena itu, Rasulullah SAW menekankan agar berusaha dan bekerja. Seperti yang terkandung didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Departemen Agama RI 2025).

Berdasarkan perspektif ekonomi syariah, berikut merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang selaras dengan implementasi blue economy dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kelurahan Bajoe:

a. Prinsip Keimanan

Prinsip keimanan dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa segala sesuatu di bumi, termasuk sumber daya laut, adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memanfaatkannya secara bertanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Implementasi blue economy dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kelurahan Bajoe mencerminkan prinsip keimanan dalam ekonomi syariah. Dalam firman Allah pada QS. Fathir ayat 39.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Artinya: Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. (Departemen Agama RI 2025).

Oleh sebab itu, aktivitas pengelolaan sumber daya laut harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan bersama, termasuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut sebagai bentuk tanggung jawab manusia kepada Allah SWT.

Prinsip efisiensi sumber daya alam yang menjadi salah satu aspek utama dalam blue economy belum sepenuhnya terealisasi di Kelurahan Bajoe. Berdasarkan hasil wawancara, nelayan setempat menyadari pentingnya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya laut, namun implementasinya masih terbatas pada individu.

Beberapa nelayan menghindari *overfishing* dengan hanya menangkap ikan secukupnya, tetapi kurangnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan laut menjadi hambatan utama. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam

yang menekankan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga amanah Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ ۖ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Departemen Agama RI 2025).

Rendahnya solidaritas masyarakat Kelurahan Bajoe dalam menjaga kebersihan laut juga berpengaruh pada penerapan prinsip keimanan dalam pengelolaan sumber daya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya kerja sama dan partisipasi aktif masyarakat menyebabkan upaya menjaga kebersihan laut yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti Tni, Polri, dan Babinsa menjadi tidak efektif dalam jangka panjang.

Padahal, dalam perspektif ekonomi syariah, kerja sama dalam menjaga amanah Allah SWT merupakan bagian dari ibadah yang tidak hanya berdampak pada keberkahan, tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya untuk generasi mendatang. Selain itu, pencemaran sumber daya laut akibat meningkatnya aktivitas manusia menjadi faktor eksternal yang menghambat produktivitas alat tangkap nelayan. Pencemaran ini menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada Allah SWT. Prinsip keseimbangan mengajarkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya terhadap alam, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra ayat 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban. (Departemen Agama RI 2025)

Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kesadaran spiritual dan tanggung jawab kolektif masyarakat terhadap lingkungan. Kesadaran bahwa pengelolaan sumber daya laut adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT dan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan laut dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada, sehingga keberlanjutan ekosistem laut dapat terjamin dan pendapatan nelayan dapat meningkat secara berkelanjutan.

b. Prinsip Khalifah

Prinsip khilafah dalam ekonomi syariah mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di muka bumi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan memanfaatkannya demi kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (Departemen Agama RI 2025).

Prinsip ini juga dipertegas oleh Rasulullah SAW, “setiap dari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya.” Dalam konteks implementasi blue economy di Kelurahan Bajoe, prinsip khilafah seharusnya mendorong nelayan untuk menjaga keberlanjutan laut salah satunya melalui penerapan prinsip nirlimbah.

Di Kelurahan Bajoe, penerapan prinsip nirlimbah masih sangat minim, sebagaimana hasil wawancara dengan nelayan yang menunjukkan bahwa mayoritas hasil tangkapan langsung dijual ke pasar atau pengepul tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Namun, ketiadaan mekanisme pengelolaan terhadap hasil tangkapan yang tidak terpakai atau limbah laut menunjukkan bahwa potensi ekonomi dari limbah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.

Padahal, dalam prinsip khilafah pengelolaan limbah adalah bagian dari tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Kurangnya fasilitas dan edukasi tentang pengelolaan limbah menjadi hambatan utama dalam penerapan prinsip nirlimbah di Kelurahan Bajoe. Hal ini bertentangan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ^{قُلْ} إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (Departemen Agama RI 2025).

Berdasarkan prinsip khalifa dalam ekonomi syariah, peran pemerintah juga diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Pemerintah dapat berperan dengan menyediakan fasilitas pengolahan limbah, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang daur ulang limbah hasil tangkapan, serta mendorong terciptanya usaha berbasis zero waste di masyarakat nelayan.

Dengan cara ini, nilai tambah dari hasil tangkapan dapat tercipta, meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi syariah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat.

c. Prinsip Keadilan ('*adl*)

Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap sumber daya dan distribusi manfaat ekonomi yang adil ditengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Departemen Agama RI 2025).

Prinsip ini juga melarang eksploitasi berlebihan dan ketidakadilan yang dapat merugikan pihak lain atau lingkungan. Dalam konteks blue economy di Kelurahan Bajoe, prinsip keadilan mengharuskan pengelolaan sumber daya laut tidak hanya memberikan kebebasan akses kepada nelayan tetapi juga memastikan distribusi manfaat ekonomi yang setara bagi seluruh masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Kelurahan Bajoe secara umum memiliki kebebasan penuh dalam mengakses sumber daya laut sebagai sumber penghidupan utama. Namun, meskipun akses terhadap sumber daya laut telah merata, minimnya diversifikasi usaha dikalangan elayan juga menjadi faktor yang memperlemah pendapatan mereka. Berdasarkan hasil wawancara bersama stakeholder dan masyarakat nelayan, mereka menyatakan bahwa hasil tangkapan para nelayan umumnya langsung dijual kepada pengepul atau ke pasar.

Ketiadaan usaha ini menunjukkan kurangnya dukungan berupa pelatihan, akses teknologi, atau modal yang dapat membantu nelayan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka. Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang mengharuskan distribusi manfaat yang setara dan berkelanjutan.

Prinsip keadilan mengharuskan adanya intervensi yang adil untuk mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan di Kelurahan Bajoe. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Departemen Agama RI 2025).

Ayat tersebut mengingatkan akan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah dan pemangku kepentingan diperlukan untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan akses terhadap teknologi serta pasar yang lebih luas.

Dengan adanya dukungan tersebut, nelayan dapat meningkatkan pendapatan melalui pengolahan hasil laut dan diversifikasi usaha yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terwujud secara adil dan merata.

d. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi syariah mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni antara aktivitas ekonomi dan keberlanjutan alam. Firman Allah SWT dalam QS. An-Naml ayat 61.

أَمْنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut?. (Departemen Agama RI 2025).

Ayat tersebut mengingatkan manusia bahwa Allah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna, sehingga upaya eksploitasi harus disertai tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan. Dalam konteks blue economy di Kelurahan Bajoe, prinsip ini menjadi relevan melalui inovasi dan adaptasi nelayan terhadap metode yang lebih ramah lingkungan dan keberlanjutan.

Inovasi merupakan salah satu aspek penting dalam blue economy untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi di Kelurahan Bajoe masih sangat terbatas, para nelayan belum menerima pelatihan dalam mengadopsi teknologi baru, sehingga mereka cenderung menggunakan peralatan tradisional yang mereka pelajari sendiri atau saling bantu sesama nelayan lainnya.

Penggunaan alat tangkap tradisional tidak hanya mempengaruhi nelayan, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem laut jika tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang praktik melaut yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara bersama stakeholder di kelurahan Bajoe, meskipun Dinas Kelautan dan Perikanan serta Polairun telah memberikan penyuluhan terkait larangan praktik ilegal seperti bom ikan, bus, dan katrol, edukasi tersebut hanya berfokus pada aspek pencegahan kerusakan lingkungan tanpa mendorong inovasi yang signifikan sebab belum mencakup pelatihan intensif dalam pengelolaan teknologi ramah lingkungan.

Selain itu, bantuan fisik oleh Dinas Kelautan dan Perikanan berupa alat tangkap seperti pancing, mesin, dan perahu yang diberikan kepada nelayan yang kurang mampu masih terbatas. Bantuan ini belum mampu memenuhi kebutuhan nelayan untuk berinovasi secara menyeluruh karena tidak disertai pelatihan penggunaan alat modern atau teknologi yang berkelanjutan.

Belum adanya diversifikasi usaha di kalangan nelayan juga memperlihatkan bahwa upaya untuk meningkatkan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dan pelestarian lingkungan belum maksimal. Padahal, dalam ekonomi syariah inovasi yang mendukung keberlanjutan sangat penting untuk menciptakan harmoni antara manusia dan alam sebagai bentuk penerapan prinsip keseimbangan (mizan).

Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk mendorong prinsip inovasi dan adaptasi di kalangan nelayan Kelurahan Bajoe. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anbiya ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan Kami tidak Mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (Departemen Agama RI 2025).

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala aktivitas manusia termasuk ekonomi, harus membawa manfaat bagi seluruh makhluk. Dalam konteks ini, inovasi teknologi ramah lingkungan, penyuluhan intensif, dan dukungan modal yang memadai harus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan alam sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Kesimpulan

Implementasi blue economy di Kelurahan Bajoe menunjukkan bahwa, meskipun memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan pendapatan para nelayan melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, penerapan prinsip-prinsip utama dari blue economy masih belum optimal. Dalam hal efisiensi sumber daya alam, upaya pengelolaan yang dilakukan oleh nelayan masih terbatas, ditambah dengan pencemaran laut dan peningkatan jumlah nelayan yang menurunkan produktivitas tangkapan. Selain itu, prinsip nirlimbah juga belum diimplementasikan secara menyeluruh sebab mayoritas

nelayan masih menggunakan pola penjualan tradisional yaitu dengan menjual hasil tangkapan di pasar atau kepada para pengepul, dan pengunjung sehingga tidak ada limbah yang bisa diolah yang menyebabkan potensi nilai tambah tidak tergal. Meskipun akses terhadap sumber daya laut bersifat inklusif, distribusi manfaat ekonomi masih belum maksimal akibat ketergantungan pada pasar lokal tanpa adanya diversifikasi usaha. Keterbatasan inovasi dan penggunaan teknologi modern juga menjadi kendala yang signifikan, sehingga pendapatan nelayan di Kelurahan Bajoe cenderung fluktuatif dan belum menunjukkan peningkatan yang optimal, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Implementasi blue economy dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Kelurahan Bajoe ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk meningkatkan pendapatan nelayan, banyak tantangan yang dihadapi. Prinsip keimanan dan khalifah yang mengajarkan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam belum sepenuhnya diterapkan, terutama dalam menjaga kebersihan laut dan mengelola limbah secara kolektif. Meskipun akses terhadap sumber daya laut cukup merata, distribusi manfaat ekonomi belum adil karena kurangnya diversifikasi usaha dan pengolahan hasil tangkapan. Selain itu, penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi syariah juga terhambat oleh keterbatasan inovasi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan kurangnya pelatihan serta fasilitas yang mendukung. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip blue economy sesuai perspektif ekonomi syariah yang berkelanjutan, agar pendapatan nelayan dapat meningkat secara adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adriadi, Gina Sonya, dan Mansur Afifi. 2010. "PENGEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI BERBASIS BLUE ECONOMY DI KAWASAN PESISIR KEK MANDALIKA," 1-10.
- Afzalur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. 2 ed. yogyakarta: Pt.Dana Bakti Wakaf.
- Ajeng Wijayanti dan Ramlah. 2022. "Pengaruh Concept Blue Economy Dan Green Economy Terhadap Perekonomian Masyarakat Kepulauan Seribu." 6 (3).
- Andi Patimbangi dan Rahma Hidayati Darwis. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 4 ed. yogyakarta: Lintas Nalar.
- Aulia Audrey Al Fahri,Dinda Norrahmawati, Kevin Daru Bailovan, dkk. 2022. "Reformasi Implementasi Konsep Blue Economy Sebagai Upaya Proteksi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kota Semarang" 4 (3).
- Departemen Agama RI. 2025. "Al-Hikmah, Al-Qur'an Dan Terjemahnya." 2025.
- Gina Sonya Adriadi, dkk. 2022. "Pengembangan Kegiatan ekonomi berbasis blue economy di kawasan pesisir kek Mandalika." 1 (1).
- Hani Mukaromah dan Lilik Rahmawaty. 2023. "Implementasi Blue Economy Di Wilayah

- Pesisir Kenjengan Surabaya." 7 (2).
- "Hasil Observasi Peneliti di kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia." 2024. 2024.
- M. deswan Seperly. 2020. ""Implementasi Blue Economy Pada Sektor Kelautan Dalam Upaya Mensejahterakan Nelayan Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Nelayan Tpi Gudang Lelang Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung.
- Muhammad Aziz. 2022. "Dampak Penataan Kawasan Samber Park Kota Metro Bagi Pendapatan Para Pedagang." IAIN Metro.
- Preti Sinta dan Arifin Sahaka. 2023. "Mechanism Of Fish Catch Distribution System Tuna Islamic Economics perspective (Study On Fisherman Bajoe Village)." 5 (2).
- Publika Indonesia Utama. 2022. *Prinsip Utama Blue Economy*.
- Ridho Erianto, Indra Mualim Hasibuan, dan Maryam Batubara. 2024. "Blue Economy Perspektif Maqashid Syariah." 9 (1).
- Setyawati, Lutvia Resta, Dimas Danur Cahya, Ariska Dian Novarianti, Budiman Djoko Said, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Nusa Putra, dan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir. 2021. "Implementasi konsep ekonomi biru dalam pembangunan masyarakat pesisir di kota sabang" 9 (4): 178-85.